

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan APBDesa

Merisa Oktaria^{1,*}, Rinto Alexandro²

¹ Universitas Palangka Raya; merisa.oktaria@fkip.upr.ac.id

* Correspondence author: merisa.oktaria@fkip.upr.ac.id; Tel.: +62852493993XX

Abstract: The village is a social institution that has a very important position and has very close direct interactions with the community. The village is an autonomous institution with its own traditions, customs and laws that are deeply rooted and relatively independent from interference from powers outside the institution. This research has its own reasons for choosing the APBDesa program for this interest because the APBDesa has major implications for the development of a region. The method used in this research is quantitative method. The type of data used in this research is quantitative data, namely, data in the form of numbers and questionnaire assistance to obtain answers to the research objectives. The population in this study was the village government of Tewang Karang totaling 36 people and the population based on the KK of 489 people. This sample is part of the number and characteristics possessed by the population with the sampling technique using purposive sampling. The analytical tool used is multiple linear analysis using the SPSS 25 program.

Keywords: Accountability, Transparency and Community Participation

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu Negara yang di bangun sebagai pemerintahan yang dianggap paling atas dari desa, dan desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa merupakan instansi sosial yang mempunyai posisi sangat penting dan sangata dekat langsung berinteraksi dengan masyarakat. Desa merupakan lembaga otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan diluar lembaga itu. Menurut hukum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah disebut sebagai desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah karna kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini memiliki alasan tersendiri dalam memilih program APBDesa ketertarikan ini dikarenakan APBDesa memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah daerah. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDesa, karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan dan melihat pengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen dalam pengelolaan APBDesa. Jika Semua anggaran direalisasikan dengan baik dan jujur maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitupun sebaliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan APBDesa Pada Desa Tewang Sanggaring, Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2015), dalam Subroto: (2011) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo, (2011:32) Transparansi berarti keterbukaan

(*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, adalah setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Menurut Halim, (2008: 20). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat di definisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut.

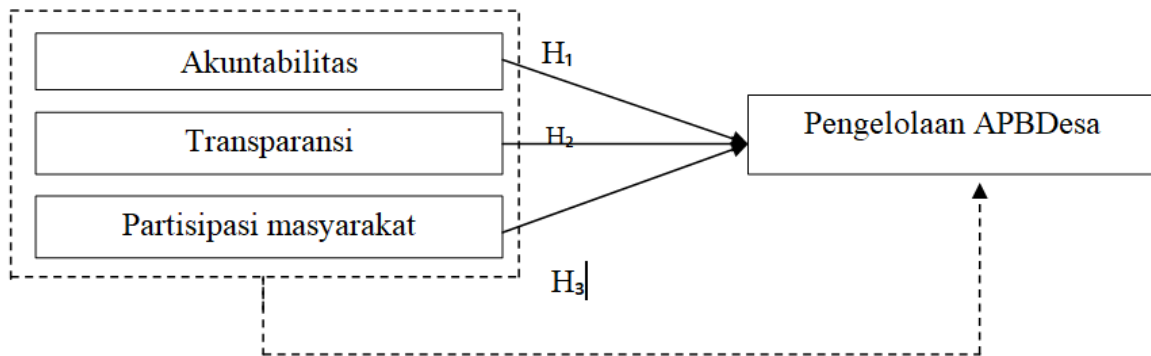
2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode kuantitatif yang lebih menitikberatkan pembuktian hipotesis dalam bentuk hubungan variabel. Menurut Sugiyono: (2017:8) Metode pendekatan kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat dan positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan koensiorer penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan dengan menekankan pada adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan dengan melalui hipotesis yang dibangun maka akan diuji dengan formula statistik dan teknik analisis tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa Tewang Karang berjumlah 36 orang dan jumlah penduduk berdasarkan KK 489 jiwa. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh Populasi tersebut dengan Teknik penentuan sampel menggunakan *Purposive Sampling*. Dengan total populasi penelitian adalah pemerintah desa berjumlah 36 orang dan masyarakat desa berdasarkan KK berjumlah 564 jiwa. Dimana *purposive sampling* dinyatakan sebagai teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang berasal dari populasi penelitian yaitu berikut kriteria penelitian desa yang menggunakan teknik *purposive sampling* yang terpilih untuk di jadikan sampel penelitian adalah pemerintah Desa Tewang Karang:

- 1) Aparatur Desa Tewang Karang.
- 2) Semua unit kegiatan pemerintahan dalam pengelolaan APBDesa dan Pembangunan Desa Tewang Karang.
- 3) Tokoh Masyarakat Desa (Mantir adat dan Tokoh Agama).
- 4) Pengawas Desa dari Kecamatan Pulau Malan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu, data yang berupa angka dan bantuan koensiorer untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui media penyebaran koensiorer (angket penelitian) seputar pernyataan koensiorer yang diajukan kepada responden penelitian. Data sekunder adalah data berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang di publikasikan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan melakukan penyebaran angket penelitian untuk memperoleh jawaban responden atas beberapa item pertanyaan tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan APBDesa.

Gambar 1. Model Penelitian



Keterangan :

- - - - -> : Pengaruh secara simultan
- > : Pengaruh secara parsial

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai suatu hubungan antara variabel satu, dengan variabel yang lain. Dalam hal ini untuk variabel independen pengaruh akuntabilitas transparansi, dan Partisipasi masyarakat sedangkan untuk variabel dependen adalah pengelolaan APBDesa. Koesioner dalam penelitian ini dikembangkan oleh (Sri Lestari: 2016) yang digunakan untuk mengukur bentuk keterbukaan dalam rangka peran dari APBDesa sehingga dapat di ketahui dan di awasi bersama. Dengan pengukuran sebagai bahan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji statistik regresi linier berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas, validitas dan reliabilitas model persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Pengelolaan APBDesa
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- X₁ = Akuntabilitas
- X₂ = Transparansi
- X₃ = Partisipasi Masyarakat
- e = Residual (variabel kesalahan)

Jika dalam perhitungan statistik pengujian disebut signifikan apabila suatu nilai dari statistiknya berada pada situasi kritis (H₀ ditolak), dan pengujian pada nilai statistik (H_a Diterima), maka pengujian ini dapat ditulis sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan dari pengujian bernilai >0,05 Maka H₀ diterima dan H_a ditolak
2. Jika nilai signifikan pengujian bernilai <0,05 Maka H₀ ditolak dan H_a di terima.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Desa Tewang Karang merupakan bagian dari Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Batas Desa Tewang Karang meliputi bagian sebelah utara Desa Tbg Tanjung/Tbg Tungku bagian sebelah timur yaitu Desa Kabupaten Gunung Mas, dibagian sebelah selatan yaitu Desa Tbg Lawang/Dahian Tunggal dan bagian sebelah barat yaitu Desa Desa Tbg Tungku/Geragu/Kali Katingan. Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor Pertanian dan petambangan, di samping sektor-sektor lainnya baik berupa jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan dan pengusaha swasta. Biografis sejarah data yang menggambarkan keadaan desa Tewang Karang adalah:

1) Monografi Desa

Tabel 1. Monografi Desa Tewang Karang

No	Uraian	
1	Luas wilayah :13.704 Hektar/Dengan titik kordinat : 1. S1 27 38.0 E113 19 29.0 2. S1 28 14.8 E113 20 05.3 3. S1 31 31.9 E113 21 39.6 4. S1 32 09.0 E113 23 20.0 5. S1 35 36.0 E113 14 54.0 6. S1 35 33.0 E113 13 04.0 7. S1 34 39.0 E113 14 10.0 8. S1 30 09.0 E113 14 39.0	
2	a) Jumlah RT = 3 b) Jumlah RW = 1 c) Jumlah KK :156 d) Jumlah Penduduk laki-laki : 298 e) Jumlah Penduduk Perempuan : 265	
3	Batas wilayah :	
	a. Utara	Desa Tbg Tanjung/Tbg Tungku
	b. Selatan	Desa Tbg Lawang/Dahian Tunggal
	c. Barat	Desa Tbg Tungku/Geragu/Kali Katingan
	d. Timur	Desa Kabupaten Gunung Mas
4	Topografi: a) Luas kemiringan lahan (rata-rata) b) Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 3 m	
5	Hidrologi : -	
6	Klimatologi : a) Suhu 27 – 30 °C b) Curah Hujan 2000/3000 mm c) Kelembaban udara 80% s/d 90% d) Kecepatan angin rata-rata	

7	Luas lahan pertanian: a) Sawah teririgasi : Ha b) Sawah tadah hujan :150 Ha
8	Luas lahan pemukiman :100 Ha
9	Kawasan rawan bencana: Banjir : 300 Ha

Sumber: Profil Desa Tewang Karang, Tahun 2019

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan antara pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDesa secara bersama-sama dengan menggunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 2. Regresi Linier Berganda

Model	Ustandarnized coeffecients		Standarnized coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	26.087	14.083		7.032	.000
Akuntabilitas (X ₁)	446	426	351	2.824	.007
Transparansi (X ₂)	584	436	420	2.990	.006
Partisipasi Masyarakat (X ₃)	454	343	313	3.246	.005

Sumber : Data Diolah SPSS versi 20,0

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan persamaan regresi linear berganda dapat sebagai berikut :

$$Y = 26,087 + 0,446 X_1 + 0,584 X_2 + 0,454 X_3 + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda maka akuntabilitas diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 2.824 dengan tingkat signifikansi $446 < 0,05$, hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas (X₁) memiliki nilai pengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan APBDesa maka hipotesis pertama Ho diterima dan Ha ditolak dengan koefisien regresi menunjukkan hasil 0.007 dapat diartikan bahwa akuntabilitas (pertanggungjawaban) berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBDesa. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda maka variabel transparansi diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 2.990 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.584 > 0,05$ jadi dapat diartikan bahwa transparansi yang dinyatakan sebagai variabel (X₂) memiliki nilai pengaruh yang positif signifikan terhadap pengelolaan APBDesa maka hipotesis ke dua Ho diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan penjelasan hasil dari koefisien regresi yang menunjukkan hasil analisis sebesar 0.584. Diartikan transparansi (keterbukaan) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan APBDesa. Mengapa dinyatakan berpengaruh positif signifikan karena variabel transparansi atau keterbukaan sudah melaksanakan pengelolaan APBDesa yang dilaporkan ke kabupaten/kota sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan keterbukaan atas informasi kepada masyarakat desa dengan menggunakan media papan pengumuman dan informasi keuangan melalui rapat dan spanduk yang dipajang didepan kantor desa dan persimpangan desa dan spanduk kegiatan realisasi program yang dibiayai dengan menggunakan anggaran APBDesa. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda maka variabel transparansi diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 3.246 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.454 > 0,05$ jadi dapat diartikan bahwa transparansi yang dinyatakan

sebagai variabel (X2) memiliki nilai pengaruh yang positif signifikan terhadap pengelolaan APBDesa maka hipotesis ke dua Ho diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan penjelasan hasil dari koefisien regresi yang menunjukkan hasil analisis sebesar 0.454. Diartikan bahwa partisipasi masyarakat telah dilaksanakan bersama dengan bukti yang dapat dilihat dan dinilai oleh peneliti pada saat melaksanakan penelitian pada desa Tewwang Karang. Dimana partisipasi masyarakat desa dapat diukur melalui tenaga, material dan gotog royong dalam menjalankan pembangunan dan program desa. dengan adanya partisipasi dari masyarakat desa dalam membantu dan mengawasi pembangunan dan pengelolaan APBDesa maka desa akan dianggap aman dari kegiatan penyalahgunaan keuangan desa Karena masyarakat desa aktif dalam membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan desa dan membangun desa sesuai dengan program desa. Berdasarkan indikator pendukung dalam penelitian ini dinyatakan bahwa Partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk kepedulian masyarakat desa dalam membangun desa dan menjadikan desanya sejahtera dengan mengandalkan keuangan desa yang diberikan kepada desa. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda maka variabel transparansi diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 7.032 dengan tingkat signifikansi sebesar $26.087 > 0,05$ jadi dapat diartikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pengelolaan APBDesa yaitu sebagai variabel dependen maka hipotesis ke dua Ho diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan penjelasan hasil dari koefisien regresi yang menunjukkan hasil analisis sebesar 26.087. Diartikan bahwa variabel independen telah diterapkan dan dilaksanakan bersama dengan bukti yang dapat dilihat dan dinilai oleh peneliti pada saat melaksanakan penelitian pada desa Tewwang Karang. Dimana partisipasi masyarakat desa dapat diukur melalui tenaga, material dan gotog royong dalam menjalankan pembangunan dan program desa. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat desa dalam membantu dan mengawasi pembangunan dan pengelolaan APBDesa maka desa akan dianggap aman dari kegiatan penyalahgunaan keuangan desa Karena masyarakat desa aktif dalam membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan desa dan membangun desa sesuai dengan program desa.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Ayundia Ati, (2014) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa belum terlalu terbuka dalam kegiatan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa karena masyarakat desa tidak memperdulikan segala kegiatan pemerintahan dan membantu pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan desa sesuai dengan apa yang menjadi prioritas dan kebutuhan mendasar dari desa dan masyarakat desa. sehingga dari penelitiannya memberikan hasil bahwa variabel Transparansi sebagai variabel independen dinyatakan memiliki nilai pengaruh yang signifikan positif terhadap variabel dependen. Karena dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh akuntabilitas transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan APBDesa. Penelitian ini dilakukan di Desa Tewang Karang, Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Dengan responden pemerintah desa dan masyarakat desa yang berjumlah 45 responden (Sampel Penelitian).

1. Akuntabilitas Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Pengelolaan APBDesa

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBDesa diperoleh nilai koefisien dari t hitung 2.824 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007 hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas (X1) memiliki nilai pengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan APBDesa.

2. Transparansi Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengelolaan APBDesa

Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 2.990 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.584 > 0,05$ jadi dapat diartikan bahwa transparansi yang dinyatakan sebagai variabel (X2) memiliki nilai pengaruh yang positif signifikan terhadap pengelolaan APBDesa

3. Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Pengelolaan APBDesa

Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 3.246 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.454 > 0,05$ jadi dapat diartikan bahwa transparansi yang dinyatakan sebagai variabel (X3) memiliki nilai pengaruh yang positif signifikan terhadap pengelolaan APBDesa

4. Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Pengelolaan APBDesa

Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 7.032 dengan tingkat signifikansi sebesar $26.087 > 0,05$ jadi dapat diartikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pengelolaan APBDesa

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, 2013:28 *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta.
- Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T, 2014. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2*, Januari 2013: 94-103
- Abdul Hamid, 2008:96. Tentang PAD penerimaan daerah dan sumber asli daerah. Jakarta.
- Arikunto, S. 2012. *Manajemen penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang, 2011:22. Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten. Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
- Dika Wahyuni, 2016. Jurnal Skripsi. Tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Serang Banten.
- Dwiyanto, Agus. 2015. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Diantoro Kusumo, 2013. Skripsi Pull. Tentang transparansi keterbukaan pemerintah desa, Universitas Bandung.
- Ellwood, 2016. dalam Mahsun, 2009. Tentang Akuntabilitas Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kewajiban. Jakarta.
- Elgia Astuty, 2014. Jurnal Skripsi. Tentang Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa Untuk pembangunan desa. Surakarta.
- Fanida, Eva Hany dan Elgia Astuti, 2012. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Study pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*.
- Gozhali, 2016. Alat Uji determinasi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- Goilford. 2013. Alat Uji Analisis Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Heru Rochmansjah dan Chabib Soleh, 2015:03. Skripsi. Tentang perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa.
- Hari Sabarno, 2011;10. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi, Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*. Jakarta: LIPI Press.
- Halim, Abdul dan Muhamad, Iqbal. 2012:83. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Harjono Hery, 2016. Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kuta i Timur", eJurnal Ilmu Pemerintahan
- Iqsan, 2016. Desa sebagai kawasan otonom dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta: LIPI Press.
- Kurnia, 2016. Jurnal Skripsi. Tentang pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa.
- Kamendagri, No. 29 Tahun 2002. Tentang pedoman pengurusan dan pengawasan keuangan desa.

- Linda Lestari, 2015. Jurnal. Skripsi. Tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban APBDesa.
Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, 2015 dalam Subroto, 2011. Akuntabilitas kewajiban memberikan pertanggungjawaban. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. YKPN: Jakarta.
- Lalolo, 2011:17 Tentang Akuntabilitas Finansial Perdesaan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu akuntansi Desa.
- Mardiasmo, 2015:46. Tentang akuntabilitas kewajiban. Jakarta: Andy.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo, 2013. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2010:24. Tentang penetapan otonomi daerah dalam MPR No. XV/MPR/1998.
- Mahsun, 2008:46. Tentang anggaran APBDesa dalam pengeluaran dan penerimaan desa.
- Muhamad Iqbal, 2015 dalam Abdul Halim 2015:83. Jurnal Skripsi. Akuntabilitas dalam memberikan pertanggungjawaban kinerja organisasi.
- Mohamad Iqbal, 2015:84. Dimensi Akuntabilitas dalam suatu organisasi pertanggungjawaban. Bandung
- Mardiasmo, 2017. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. [www. kajianpustaka. com](http://www.kajianpustaka.com)
- Mardiasmo, 2014. Transparansi sebagai bahan validasi premis pembangunan desa. [www. Kajianpustaka. com](http://www.Kajianpustaka.com)
- Nurdiawan, 2011. Tentang PADesa dalam penyajian informasi keuangan.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Kader Pemberdayaan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri).. No. 13 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan keuangan Desa
- Paul H Landis. 2014:12. Tentang Kelompok belanja transfer dalam pengeluaran dana desa,
- Priyatno Dwi, 2012. *Metode Uji Penelitian*. LP3ES. Jakarta. 2012:137-139
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri). No. 113 Tahun 2014. Pasal 1 ayat 6. Tentang Pengukuran keuangan desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pngelolaan keuangan desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri), No.113 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Nomor 5 Tahun 2015
- Rasul, Syahrudin, 2014;11. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Sulistiani dalam Subroto, 2011. Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaran Pemerintahan. Jakarta.
- Sintia Ayu, 2012. Skripsi Pull. Tentang transparansi sebagai fasilitas penyebaran informasi dalam kegiatan melayani. Bandung.
- Soetardjo, 2015. Tentang Administerasi posisi desa dalam kewenangan keberagamaan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2017:8. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Solekhan, 2012:15. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sri Lestari, 2016. Angket Koesioner Penelitian Kuantitatif. Jakarta
- Sebastian Yuda, 2016. Jurnal Skripsi. Tentang pengaruh prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa Di desa Karangrejo.
- Sumpeno, 2011:222. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Sugeng Praptoyo, 2015. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Swith, Max George, 2010. *Principals and Agents: An explanatory model of public budgeting*. *Journal of Public Budgeting and Financial Management* (Fall): 325-353.

- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Syachbrani, 2014. Pengertian tentang Desa dan pemahaman desa. Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono, 2012:116. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syarudin Rasul, 2002:11. Dimensi Akuntabilitas. Jakarta. Salemba Empat.
- Subroto, 2011, dalam Sulistiani, 2011, transparansi dan akuntabilitas sebagai kunci penyelenggaraan pemerintahan. Jakarta.
- Thomas, 2013:12. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.
- Teguh Kurniawan, 2011 dalam Lalolo, 2011:17. Akuntabilitas financial. Jakarta.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Undang-undang NO, 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pengembangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Virgie, Dkk. 2013:97. Tentang pengelolaan keuangan desa dalam kebijakan desa. LIPI. Press.
- Wahyudin, 2015:130. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Pendidikan*. Semarang: Unnes Press. Edisi 1
- Zyen, Elvira, 2011. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Trikonomika*, 10 (1): 52-62